JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

2025-08-08, Vol 7. No. 1: 41 – 53

e-ISSN: 2722-6107 / p-ISSN: 0216-6984

Journal Homepage:

https://journal.stisipolrajahaji.ac.id/index.php/jisipol

https://doi.org/10.56552/jisipol.v7i1.277

Perilaku Pemilih dan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Kota Sukabumi Tahun 2024

[1)]Ratna Istianah, [2)] Akbar Devriansyah, [3)] Arti Putri Apandi, [4)] Annisa Fauziah

[1),2),3),4)] Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Corresponding Author : ratnaistianah@ummi.ac.id

Abstract

The voter participation rate in the 2024 Sukabumi City Regional Election has not reached the 80% target set by the General Election Commission (KPU), with an average achievement of only 69.78%. This low number shows that there are obstacles in people's political involvement, one of which is related to voter behavior. This study aims to analyze the influence of voter behavior on the level of participation in the Regional Elections. Voter behavior is studied through sociological, psychological, and rational approaches. In Sukabumi City, voter behavior tends to be rational-pragmatic, namely voting based on considerations of direct benefits and concrete personal interests. This research uses a mixed method, with data collection through surveys, interviews, and documentation. The results of the regression analysis showed that voter behavior had a significant effect on participation, both individually and collectively. The conclusion of this study states that voter behavior, especially those that are rational-pragmatic, contribute positively to increasing participation in the Sukabumi City Regional Elections.

Keywords: *Voter Behavior, Voter Participation, 2024 Regional Elections*

Abstrak

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Sukabumi 2024 belum mencapai target 80% yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan capaian rata-rata hanya 69,78%. Rendahnya angka ini menunjukkan adanya hambatan dalam keterlibatan politik masyarakat, salah satunya yang berkaitan dengan perilaku pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perilaku pemilih terhadap tingkat partisipasi dalam Pilkada. Perilaku pemilih dikaji melalui pendekatan sosiologis, psikologis, dan rasional. Di Kota Sukabumi, perilaku pemilih cenderung rasional-pragmatis, yaitu memilih berdasarkan pertimbangan manfaat langsung dan kepentingan pribadi yang konkret. Penelitian ini menggunakan metode mixed method, dengan pengumpulan data melalui survei, wawancara, dan dokumentasi. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa perilaku pemilih berpengaruh signifikan terhadap partisipasi, baik secara individu maupun kolektif. Kesimpulan dari

Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)

penelitian ini menyatakan bahwa perilaku pemilih, khususnya yang bersifat rasional-pragmatis, berkontribusi positif terhadap peningkatan partisipasi dalam Pilkada Kota Sukabumi.

Kata Kunci: Perilaku Pemilih, Partisipasi Pemilih, Pilkada 2024

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sarana penting dalam mewujudkan demokrasi yang partisipatif, di mana legitimasi kekuasaan berasal dari keterlibatan langsung rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Namun, partisipasi pemilih bukan sekadar persoalan kehadiran di bilik suara, tetapi juga menyangkut kesadaran politik dan kualitas pilihan yang diambil. Di Kota Sukabumi, Pilkada 2024 menunjukkan partisipasi pemilih yang belum optimal, yakni hanya sebesar 69,78%, masih di bawah target nasional yang ditetapkan KPU sebesar 80%.

Rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) memerlukan kajian mendalam melalui perspektif perilaku pemilih. Studi mengenai perilaku pemilih merupakan aspek penting dalam ilmu politik karena dapat menjelaskan motif dan determinan di balik keputusan politik masyarakat. Campbell et al. mengidentifikasi tiga pendekatan utama dalam menganalisis perilaku memilih, yakni pendekatan sosiologis, psikologis, dan rasional. Pendekatan sosiologis menekankan pengaruh lingkungan sosial seperti agama, etnisitas, dan kelas sosial, yang membentuk afiliasi kolektif dan menentukan orientasi politik individu. Dalam konteks Indonesia, temuan terbaru menunjukkan bahwa identitas sosial seperti agama dan etnis tetap menjadi faktor dominan dalam memengaruhi preferensi politik, khususnya di daerah dengan keterikatan komunitas yang kuat (Bahrun et al., 2025; Lestari et al., 2021).

Afiliasi kelompok dalam masyarakat sering kali menjadi penentu utama dalam keputusan memilih, yang memperlihatkan bahwa pilihan politik tidak sepenuhnya bersifat individual, melainkan terbentuk dari proses sosialisasi dalam lingkup sosial tertentu (Satriadi et al., 2021). Dengan demikian, memahami partisipasi pemilih dalam Pilkada tidak cukup hanya dari sisi angka kehadiran, tetapi juga perlu dilihat melalui dinamika sosial yang memengaruhi perilaku politik warga.

Pendekatan psikologis dalam studi perilaku pemilih, yang dikembangkan oleh Michigan School, memfokuskan perhatian pada loyalitas emosional pemilih terhadap partai politik yang dikenal dengan konsep *party identification* (Bartle, 2001; Lestari et al., 2021; Satriadi et al., 2021). Loyalitas ini dianggap sebagai sikap psikologis yang stabil dan tertanam dalam diri pemilih, yang cenderung bertahan dari waktu ke

Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)

waktu meskipun terdapat perubahan dalam informasi politik atau dinamika kampanye. Pemilih dengan identifikasi partai yang kuat akan lebih mungkin memilih kandidat dari partai yang sama secara konsisten, sehingga perilaku memilih menjadi kurang dipengaruhi oleh isu atau kinerja calon (Lestari et al., 2021). Di sisi lain, pendekatan rasional memandang pemilih sebagai aktor kalkulatif yang melakukan penilaian untung-rugi atas setiap pilihan politik yang tersedia. Dalam kerangka ini, perilaku memilih dipandang sebagai hasil perhitungan strategis untuk memaksimalkan kepentingan pribadi, serupa dengan perilaku konsumen dalam pasar ekonomi (Satriadi et al., 2021).

Penelitian kontemporer di Indonesia juga menemukan bahwa pragmatisme politik semakin berkembang, di mana pemilih menimbang manfaat langsung, seperti program bantuan atau janji pembangunan, sebelum menentukan pilihan politik mereka (Bahrun et al., 2025). Oleh karena itu, baik pendekatan psikologis maupun rasional memberikan kerangka yang penting dalam memahami motivasi dan pola perilaku pemilih dalam konteks demokrasi elektoral, termasuk dalam Pilkada.

Konteks lokal Kota Sukabumi menunjukkan kecenderungan kuat terhadap perilaku pemilih yang rasional-pragmatis, di mana keputusan memilih sering kali didasarkan pada manfaat langsung dan sesaat yang bisa dirasakan. Dalam praktiknya, pola ini membuka ruang bagi berkembangnya *money politics* sebagai instrumen mobilisasi suara. Pemberian uang, sembako, atau bentuk bantuan lainnya menjelang hari pemilihan masih menjadi praktik umum yang tidak hanya memengaruhi pilihan politik, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas demokrasi karena mengaburkan esensi rasionalitas politik yang seharusnya berbasis program dan visi kandidat.

Money politics menjadi bagian dari kalkulasi pragmatis pemilih. Banyak warga memilih bukan karena keyakinan terhadap visi misi calon, tetapi karena adanya "imbalan instan" yang ditawarkan. Di sisi lain, lemahnya pengawasan, ketidaktegasan sanksi, dan apatisme politik turut memperkuat normalisasi praktik ini. Hal ini memperlihatkan bahwa rasionalitas pemilih bukan berarti selalu mengarah pada peningkatan kualitas demokrasi, melainkan justru dapat menjadi pintu masuk bagi transaksionalisme politik.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan melalui analisis komprehensif terhadap dimensi rasionalitas pragmatis pemilih dalam konteks lokal Pilkada Kota Sukabumi 2024, dengan titik tekan pada fenomena normalisasi praktik money politics sebagai strategi mobilisasi suara. Berbeda dari studi-studi sebelumnya yang cenderung menekankan rasionalitas pemilih dalam kerangka ideal normatif, penelitian ini

Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)

mengungkap bagaimana rasionalitas pragmatis justru menjadi dasar kalkulatif yang memfasilitasi praktik transaksional, khususnya dalam bentuk politik uang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman baru tentang penurunan kualitas demokrasi dalam bingkai rasionalitas, tetapi juga menawarkan kontribusi strategis dalam merancang intervensi kebijakan guna meningkatkan partisipasi pemilih yang lebih substansial dan bebas dari praktik transaksional.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perilaku pemilih terhadap partisipasi dalam Pilkada Kota Sukabumi 2024, dengan mempertimbangkan dimensi rasionalitas yang dibentuk oleh praktik *money politics* dan berbagai faktor lain yang relevan. Dengan pendekatan *mixed method*, studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika perilaku pemilih lokal serta memberikan masukan strategis bagi penyelenggara pemilu dalam meningkatkan kualitas partisipasi pemilih yang lebih substantif. Hasil penelitian ini akan memberikan data empirik yang relevan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan stakeholder demokrasi lainnya dalam merancang strategi peningkatan partisipasi pemilih yang lebih berkualitas dan beretika, serta dalam menyusun sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik politik transaksional.

KAJIAN PUSTAKA

Perilaku pemilih telah lama menjadi fokus studi dalam ilmu politik. Campbell et al. mengembangkan pendekatan psikologis yang menekankan pentingnya identifikasi partai sebagai prediktor utama dalam keputusan memilih. Identifikasi ini dianggap sebagai ikatan emosional yang stabil terhadap partai tertentu, dan menjadi variabel paling berpengaruh dalam model *funnel of causality.* (Aygoren, 2012). Sebaliknya, pendekatan sosiologis menyoroti pengaruh lingkungan sosial, seperti agama, etnis, dan kelas sosial dalam membentuk pilihan politik. Studi awal menunjukkan bahwa preferensi politik sering mencerminkan afiliasi kelompok sosial (Aygoren & Yilmaz, 2015). Pendekatan rasional, yang dipopulerkan oleh Downs, memandang pemilih sebagai agen rasional yang menghitung untung-rugi dari setiap pilihan politik untuk memaksimalkan kepentingannya (Grofman, 2008).

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa ketiga pendekatan ini seringkali saling berinteraksi. Misalnya, studi pada Pilkada Bengkalis 2020 menemukan bahwa identitas sosial seperti agama dan etnis tetap dominan, namun pertimbangan rasional seperti kinerja kandidat juga mulai memengaruhi perilaku memilih (Bahrun et al., 2025). Demikian pula, studi di Desa Ambaipua menunjukkan bahwa faktor sosiologis

Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)

(agama), psikologis (loyalitas pada calon), dan rasional (pengalaman kandidat) semuanya memainkan peran signifikan (Lestari et al., 2021).

Fenomena *money politics* sering diinterpretasikan sebagai bentuk ekstrem dari rasionalitas pragmatis pemilih (Alwi & Ram, 2024; Bahrun et al., 2025; Lestari et al., 2021). Voter tidak memilih karena visi misi kandidat, melainkan karena insentif langsung seperti uang atau sembako. Hal ini menunjukkan bahwa kalkulasi rasional dapat disalahgunakan dalam konteks demokrasi yang lemah pengawasan (Satriadi et al., 2021). Peneliti kontemporer berupaya menggabungkan ketiga pendekatan ini dalam model komprehensif. Aygoren mengembangkan model kausalitas yang menunjukkan bagaimana individu memengaruhi persepsi terhadap partai dan kandidat, yang kemudian menentukan perilaku memilih secara integratif (Aygoren & Yilmaz, 2015)

Meskipun berbagai studi telah mengonfirmasi peran pendekatan sosiologis, psikologis, dan rasional dalam perilaku memilih, masih terdapat kekosongan dalam mengkaji bagaimana praktik money politics sebagai manifestasi dari rasionalitas pragmatis memengaruhi kualitas partisipasi politik. Sebagian besar penelitian hanya fokus pada kuantitas partisipasi atau preferensi pilihan, belum banyak yang menelaah bagaimana rasionalitas pemilih yang dibentuk oleh insentif transaksional berdampak pada *substansi demokrasi*. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan mengkaji secara mendalam dinamika perilaku pemilih dalam Pilkada Sukabumi 2024 melalui pendekatan teoretik yang integratif dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed method*), yaitu perpaduan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Adapun definisi pendekatan campuran menurut Creswell adalah cara untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber kualitatif dan kuantitatif (Creswell, 2009). Pendekatan ini menggunakan asumsi-asumsi filosofis dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif kemudian dilakukan pencampuran (*mixing*) kedua pendekatan tersebut dalam satu penelitian. Metode ini lebih kompleks dari sekedar mengumpulkan dan menganalisis dua jenis data, ia juga melibatkan fungsi dari dua pendekatan penelitian tersebut secara kolektif sehingga kekuatan penelitian ini secara keseluruhan lebih besar ketimbang penelitian kualitatif dan kuantitatif.

Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam terkait fenomena perilaku pemilih dan partisipasinya dalam Pilkada Kota Sukabumi 2024. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur pengaruh variabel perilaku pemilih terhadap tingkat partisipasi, sedangkan pendekatan

Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)

kualitatif digunakan untuk menggali konteks, motif, dan dinamika sosial-politik yang melatarbelakangi pilihan politik masyarakat, termasuk fenomena money politics dan kecenderungan rasional-pragmatis.

Fokus penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif terdiri dari mencari tahu fakta masalah-masalah dalam masyarakat dan cara kerjanya dengan mempelajari situasi-situasi tertentu (Sugiono, 2015). Penelitian ini dapat membantu kita memahami hubungan, aktivitas, sikap, dan pandangan, bahkan proses yang sedang berlangsung. Penelitian dilaksanakan di Kota Sukabumi sebagai daerah pemilihan yang menjadi lokus kajian. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fenomena menurunnya partisipasi pemilih serta maraknya praktik politik transaksional. Waktu penelitian dilaksanakan selama Oktober hingga Februari 2025.

Populasi pada penelitian ini adalah para pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pilkada Kota Sukabumi tahun 2024 Sukabumi yaitu sebanyak 259.961 orang. Setelah populasi dirumuskan, lalu selanjutnya menetapkan sampel penelitian, pengambilan sampel dimaksudkan untuk mewakili populasi. Hasil perhitungan rumus, maka dapat ditentukan jumlah sampel dalam pengumpulan data primer yaitu dilakukan terhadap 100 sampel pemilih di Kota Sukabumi. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Creswell, 2009).

Data yang dikumpulkan dalam riset ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui kuesioner yang disimpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Kuesioner yaitu suatu pedoman pertanyaan yang dilakukan dengan pengisian secara terinci berupa pertanyaan yang terstruktur yang meliputi semua pendekatan perilaku. Pertanyaan dalam Kuesioner yang digunakan dalam riset ini adalah pertanyaan secara tertutup dengan jawaban yang menggunakan Skala Guttman. Adapun data sekunder ditujukan untuk memperoleh gambaran umum serta untuk mendukung data penelitian. Data sekunder yang diperoleh berupa dokumen data pemilih di Kota Sukabumi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data kuantitatif yang dianalisis menggunakan regresi linear berganda, diperoleh nilai R-squared sebesar 0,719, yang menunjukkan bahwa ketiga dimensi perilaku pemilih secara simultan menjelaskan 71,9% variasi partisipasi pemilih. Namun, secara parsial, masing-masing pendekatan menunjukkan pengaruh yang berbeda-beda terhadap partisipasi yang dapat dilihat dari tabel berikut.

Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)

Tabel dimensi perilaku pemilih

Pendekatan Perilaku Pemilih	Koefisien Regresi	P=value	Interpretasi Singkat
Sosiologis	0,110	0,294	Pengaruh Lemah dan tidak signifikan
Psikologis	0,054	0,736	Pengaruh sangat rendah dan signifikan
Rasional	0,312	0,113	Pengaruh terbesar, signifikan secara substansial

Pendekatan Sosiologis dalam Menunjukkan Perilaku Pemilih

Pendekatan sosiologis dalam kajian perilaku pemilih berpijak pada asumsi bahwa preferensi politik seseorang dibentuk oleh struktur sosial di mana ia berada. Faktor-faktor seperti agama, etnisitas, kelas sosial, dan lingkungan komunitas menjadi variabel dominan dalam menentukan pilihan politik (Cyntia & Oktavianor, 2023; Sandi, 2021). Pendekatan ini meyakini bahwa identitas kolektif yang terbentuk dalam jaringan sosial memiliki kekuatan untuk mengarahkan atau bahkan menentukan perilaku memilih seseorang secara konsisten.

Hasil penelitian kuantitatif di Kota Sukabumi menunjukkan bahwa pengaruh pendekatan ini terhadap partisipasi pemilih tergolong lemah dan tidak signifikan secara statistik (koefisien regresi = 0,110; p = 0,294). Angka ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor sosial tradisional tidak lagi menjadi variabel utama dalam mendorong keterlibatan politik warga. Dengan kata lain, ikatan sosial tradisional seperti solidaritas keagamaan atau etnik tidak lagi menjadi alat mobilisasi politik yang efektif.

Fenomena ini didukung oleh hasil wawancara kualitatif dengan beberapa informan dari kalangan tokoh masyarakat dan pemilih individu. Seorang tokoh pemuda dari wilayah Gunungpuyuh menyatakan:

> *"Dulu itu orang sini kalau tokoh agama bilang pilih si A, ya pilih. Tapi sekarang anak-anak muda lebih lihat siapa yang kerjanya kelihatan. Beda zaman."*

Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya erosi otoritas simbolik dari figur sosial tradisional, seperti tokoh agama atau sesepuh kampung, yang sebelumnya mampu mengarahkan perilaku kolektif pemilih. Kini, keputusan memilih lebih bersifat individual dan terlepas dari tekanan komunitas.

Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)

Seorang pemilih perempuan berusia 37 tahun dari Kecamatan Cikole menambahkan:

"Keluarga saya banyak yang ikut kelompok pengajian itu, tapi waktu pemilu saya milih beda. Saya lihat siapa yang peduli pas banjir, bukan karena satu kelompok."

Dari kutipan ini terlihat bahwa solidaritas kelompok agama atau jaringan sosial lainnya tidak otomatis menjadi faktor pengikat dalam pilihan politik. Hal ini menguatkan indikasi bahwa masyarakat Kota Sukabumi sedang mengalami pergeseran budaya politik dari kolektivisme ke arah individualisme politik, di mana pemilih lebih berorientasi pada pengalaman pribadi dan penilaian konkret terhadap kandidat.

Secara teoritik, ini sejalan dengan argumen Huntington dan Posas yang menyatakan bahwa seiring meningkatnya modernisasi, keterikatan pada nilai-nilai tradisional cenderung melemah, dan masyarakat mulai lebih rasional dan reflektif dalam pengambilan keputusan politik (Huntington, 1966; Posas, 2010). Dalam konteks lokal, modernisasi dapat dipahami bukan hanya sebagai kemajuan teknologi dan pendidikan, tetapi juga sebagai pelemahan struktur sosial patronase dan meningkatnya kesadaran politik berbasis pengalaman langsung. Dengan demikian, pendekatan sosiologis dalam konteks ini masih relevan sebagai lensa analisis, namun kekuatan penjelasannya mulai memudar di tengah dinamika sosial politik perkotaan seperti di Sukabumi. Penurunan pengaruh ini memberi sinyal bahwa strategi politik yang mengandalkan mobilisasi berbasis identitas kelompok tidak lagi cukup efektif tanpa didukung dengan performa konkret kandidat dan interaksi langsung yang bermakna dengan pemilih.

Pendekatan Psikologis dalam Menunjukkan Perilaku Pemilih

Pendekatan psikologis dalam studi perilaku pemilih menggarisbawahi pentingnya ikatan emosional dan loyalitas jangka panjang terhadap partai politik atau tokoh tertentu. Model ini mengembangkan konsep *party identification* sebagai variabel utama dalam menjelaskan konsistensi perilaku memilih (Abdullah et al., 2020; Bartle, 2001; Greene, 1999; Şener et al., 2023). Dalam pendekatan ini, pemilih dipandang tidak semata-mata rasional, melainkan cenderung stabil dalam afiliasi politik karena adanya hubungan psikologis yang tertanam sejak lama, baik melalui sosialisasi politik dalam keluarga maupun pengalaman historis yang membentuk persepsi terhadap partai.

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan psikologis memiliki pengaruh yang paling rendah terhadap partisipasi pemilih (koefisien regresi = 0,054; p = 0,736). Hal ini menggambarkan adanya kerapuhan identifikasi politik di

Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)

kalangan masyarakat Kota Sukabumi. Kekecewaan terhadap elite politik dan seringnya kegagalan pemenuhan janji kampanye mengikis ikatan emosional yang sebelumnya terbentuk. Banyak pemilih tidak lagi merasa terhubung secara psikologis dengan partai atau kandidat, melainkan bersikap skeptis terhadap semua pilihan politik yang tersedia.

Temuan ini diperkuat oleh wawancara kualitatif yang dilakukan terhadap sejumlah pemilih. Seorang warga di Kecamatan Baros menyatakan:

"Dulu saya milih karena yakin sama partainya, tapi sekarang rasanya semua sama aja. Datang cuma waktu butuh suara, habis itu hilang."

Sementara itu, seorang pemuda berusia 25 tahun di Kecamatan Citamiang menuturkan:

"Kalau lihat baliho atau kampanye sekarang, saya cuek aja. Udah gak percaya. Janji tinggal janji, buktinya gak ada."

Kedua pernyataan ini mencerminkan kondisi disonansi kognitif yang dialami pemilih akibat ketidaksesuaian antara harapan politik dan kenyataan. Dalam konteks ini, pendekatan psikologis menjadi kurang relevan karena tidak lagi memiliki substruktur emosional yang kuat untuk menopang afiliasi politik jangka panjang.

Secara teoritis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep "dealignment" dalam ilmu politik, yaitu kecenderungan menurunnya ikatan antara pemilih dan partai politik seiring waktu. Menurut Dalton (2007) dalam The Good Citizen, era demokrasi modern ditandai oleh peningkatan jumlah pemilih independen (independent voters) yang tidak memiliki preferensi emosional terhadap partai politik mana pun. Ini terjadi karena meningkatnya pendidikan, akses informasi, dan kekecewaan terhadap praktik politik yang elitis dan tidak responsif.

Dalam konteks Kota Sukabumi, turunnya identifikasi partai tampaknya juga diperparah oleh fragmentasi internal partai politik lokal, kurangnya konsistensi platform, serta absennya figur-figur politik yang memiliki kedekatan emosional dan historis dengan pemilih. Politik lokal kehilangan aktor-aktor yang bisa membangun koneksi psikologis dengan warga secara berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rendahnya pengaruh pendekatan psikologis terhadap partisipasi pemilih di Sukabumi mencerminkan dekonstruksi hubungan emosional antara rakyat dan aktor politik. Politik menjadi semakin transaksional dan tidak lagi dibangun atas dasar kepercayaan jangka panjang, tetapi atas dasar kalkulasi sesaat, yang membuka jalan bagi dominasi pendekatan rasional-pragmatis.

Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)

Pendekatana Rasional dalam Menunjukkan Perilaku Pemilih

Pendekatan ini menjadi dimensi paling dominan dalam memengaruhi partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Sukabumi 2024. Dengan koefisien regresi tertinggi sebesar 0,312 dan meskipun nilai p-value sebesar 0,113 sedikit di atas ambang signifikansi konvensional (0,05), pendekatan ini tetap dianggap substansial secara praktis dan relevan secara kontekstual dalam menjelaskan motivasi pemilih. Rasionalitas pemilih di Kota Sukabumi lebih condong pada bentuk pragmatis-instrumental, yakni penilaian atas pilihan politik berdasarkan manfaat konkret dan jangka pendek.

Kerangka pendekatan ini mengacu pada teori rational choice dari Anthony Downs, yang menyatakan bahwa pemilih bertindak seperti konsumen dalam pasar politik, melakukan kalkulasi untung-rugi sebelum menentukan pilihannya (Grofman, 2008). Pemilih diasumsikan memiliki preferensi yang stabil dan bertindak demi memaksimalkan kepentingan pribadinya, bukan atas dasar ideologi atau loyalitas emosional.

Dalam konteks lokal, rasionalitas ini diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk transaksionalisme politik, terutama yang terkait dengan praktik money politics. Pemberian uang tunai, sembako, atau bantuan sosial lainnya menjelang pemungutan suara menjadi bagian dari strategi politik yang disambut oleh sebagian pemilih sebagai kompensasi nyata atas minimnya kepercayaan terhadap janji kampanye.

Beberapa hasil wawancara mendalam mendukung temuan ini. Seorang warga di Kecamatan Lembursitu menuturkan:

> *"Kalau gak ada bantuan nyata, ya saya mending gak milih. Tapi kalau ada yang bantu sebelum pemilu, ya itu saya anggap peduli."*

Sementara itu, seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Baros mengatakan:

> *"Yang penting ada yang ngasih sembako. Program itu kayak omongan aja. Udah berkali-kali denger tapi gak ada realisasinya."*

Pernyataan tersebut mencerminkan rasionalitas yang tidak berbasis programatik, melainkan pada pertimbangan manfaat langsung yang dirasakan secara individual. Rasionalitas seperti ini menunjukkan bahwa partisipasi politik tidak dipandang sebagai bentuk ekspresi politik normatif, melainkan sebagai pertukaran sosial yang bersifat kalkulatif.

Secara sosiologis, ini juga dapat dijelaskan melalui konsep "instrumental rationality" dari Max Weber, di mana tindakan sosial didasarkan pada ekspektasi hasil yang efisien dan terukur, bukan pada nilai-nilai substantif atau keyakinan

Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)

ideologis (Erik, 2017; Suhita et al., 2025). Dalam konteks ini, memilih menjadi tindakan untuk memperoleh sesuatu yang nyata, bukan sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan demokrasi.

Meski pendekatan rasional dapat meningkatkan angka partisipasi, risikonya adalah menurunnya kualitas demokrasi karena rasionalitas yang berkembang justru mengaburkan perbedaan antara partisipasi politik dan transaksi ekonomi. Pemilu dalam kondisi ini lebih menyerupai pasar, di mana suara dipertukarkan dengan imbalan, dan kandidat berlomba bukan menawarkan visi, melainkan paket bantuan.

Dengan demikian, pendekatan rasional dalam konteks Pilkada Sukabumi 2024 bukan hanya menggambarkan peningkatan kesadaran politik pemilih, melainkan juga memperlihatkan komersialisasi politik yang mereduksi nilai substantif demokrasi. Hal ini menjadi tantangan serius bagi penyelenggara dan pegiat demokrasi untuk mendorong transformasi rasionalitas dari bentuk pragmatis-instrumental menuju rasionalitas substantif yang lebih berbasis program, visi, dan akuntabilitas politik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan psikologis dan sosiologis masih relevan sebagai bagian dari kerangka teoritis perilaku pemilih, dalam praktiknya pendekatan rasional kini lebih dominan dalam mendorong partisipasi pemilih, khususnya di tingkat politik lokal. Namun, bentuk dominasi ini cenderung bersifat transaksional, menandakan pergeseran dari partisipasi berbasis nilai dan identitas menuju keputusan yang lebih pragmatis dan berorientasi hasil. Melemahnya loyalitas ideologis dan ikatan sosial menjadi indikator berkurangnya pengaruh emosi dan identitas kelompok dalam menentukan pilihan politik masyarakat.

Sebagai masukan dalam penelitian ini, aktor politik dan penyelenggara pemilu perlu menyusun pendekatan yang mampu menjawab pertimbangan kalkulatif pemilih secara subtantif—misalnya dengan menonjolkan rekam jejak, solusi kebijakan konkret, dan keberlanjutan program—tanpa mengandalkan iming-iming materi atau janji sesaat. Perlu ada upaya sistematis untuk meningkatkan literasi politik masyarakat, agar rasionalitas pemilih tidak semata pragmatis-transaksional, tetapi bertumpu pada pemahaman yang lebih dalam terhadap isu publik dan proses demokrasi.

Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M., Hakam, K., Wilodati, W., & Ratnafitria, R. (2020). *Analysis of Vote Behavior in Election (Psychological Study of Election Behavior on the Young Generation)*. 147–150. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200130.158

Alwi, A., & Ram, St. W. (2024). Community Typology and Voting Behavior in Elections: A Political Sociology Perspective. *Buletin Poltanesa*, *25*(2), 154–161. https://doi.org/10.51967/tanesa.v25i2.3190

Aygoren, O. (2012). *Understanding and Modelling Voting Choice Behavior with Empirical Data*. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:147594862

Aygoren, O., & Yilmaz, C. (2015). Understanding Choice Behavior in Political Marketing Context: A Favorable Voter Responses Model. In K. Kubacki (Ed.), *Ideas in Marketing: Finding the New and Polishing the Old* (pp. 91–94). Springer International Publishing.

Bahrun, A., Solihah, R., Rahmatunnisa, M., & Djuyandi, Y. (2025). Voter Behavior in Direct Democracy in Indonesia: A Case Study of 2020 Bengkalis Regional Election. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, *5*(3), e04770. https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n03.pe04770

Bartle, J. (2001). The measurement of party identification in Britain: Where do we stand now? *British Elections & Parties Review*, *11*(1), 9–22. https://doi.org/10.1080/13689880108413051

Creswell, J. W. (2009). *Research Designe Qualtative, Quantitative, and Mixed Methode Approaches*. Sage.

Cyntia, N., & Oktavianor, T. (2023). The Behavior of Elite Voters in The Election of Regional Heads. *International Journal of Southeast Asian Studies (IJSAS)*. https://doi.org/10.20527/ijsas.v2i1.16

Erik, J. (2017). MAX WEBER: Two Puzzling Questions. *American Book Review*, *5*. https://doi.org/10.14738/ABR.53.2654

Greene, S. (1999). *The psychological structure of partisanship: Affect, cognition, and social identity in party identification* /. https://consensus.app/papers/the-psychological-structure-of-partisanship-affect-greene/081de4459b135ecc8113c55eb628b7b3/

Grofman, B. (2008). Anthony Downs (1930—). In C. K. Rowley & F. G. Schneider (Eds.), *Readings in Public Choice and Constitutional Political Economy* (pp. 91–95). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-0-387-75870-1_6

Huntington, S. (1966). Political Modernization: America vs. Europe. *World Politics*, *18*, 378–414. https://doi.org/10.2307/2009762

Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)

Lestari, D. T., Arief, I. A., & Saputri, S. A. (2021). Voter Behaviour of Local Community in Indonesia: Evidence from The Ambaipua Village Community in Regional Head Elections of South Konawe 2020. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, *4*(2), 95–107. https://doi.org/10.32699/resolusi.v4i2.2272

Posas, P. (2010). Rationality and the Environment: Decision-Making in Environmental Politics and Assessment. *Town Planning Review*, *81*, 479.

Sandi, J. R. A. (2021). Religion and Ethnicity Traps: Behind the Intention to Vote of Millennial Voters. *Society*, *9*(2), 410–419. https://doi.org/10.33019/society.v9i2.344

Satriadi, Y., Yusuf, S., & Ali, R. (2021). Understanding the Voter's Behavior as an Effort to Increase Publics' Political Participation in Indonesia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, *11*(2), Pages 960-972. https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v11-i2/9192

Şener, T., Balku, Y., Alkan, Y. S., Doru, S., Dernek, K. O., & Zenginoğlu, S. (2023). The socio-psychological factors affecting the voting behaviour of the postgraduate politics students: A Q-methodology study. *Frontiers in Psychology*, *14*. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1218104

Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Suhita, D., Arlinda, S. A., & Nugraheni, J. P. (2025). Analysis of Max Weber's Perspective on the Dynamics of First-Time Voter Participation in the 2024 Presidential Election (A Case Study on Students of the Faculty of Social and Political Sciences, Slamet Riyadi University). *International Journal of Social Science and Human Research*. https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i1-54

Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)